

Resolusi Konflik Internasional: Studi Kasus Konflik Bersenjata Sipil antara Sudan Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Force (RSF) di Sudan

Rendi Prayuda¹, Riski Syafrana², Rio Sundari³, M. Arsy Ash Shiddiqy⁴

¹²³⁴ International Relations Department, Universitas Islam Riau, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p>Date received: 13 July 2024 Revision date: 14 Oktober 2024 Date published: 01 November 2024</p> <p>Keywords <i>armed conflict;</i> <i>civil war;</i> <i>conflict resolution;</i> <i>military;</i> <i>paramilitary;</i> <i>peace;</i> <i>Sudan</i></p> <p>Correspondence Email: rendiprayuda@soc.uir.ac.id</p>	<p>Sudan is located in the Sahel “Coups Belt” region, which has a long history of coups and military rule in Africa. Tensions peaked on April 15, 2023 when Rapid Support Force (RSF) paramilitary forces led by Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo and Sudan Armed Forces (SAF) forces loyal to General Fattah al-Burhan fought in the capital region, Khartoum. This paper aims to analyze the conflict resolution of civil armed conflict between SAF and RSF in Sudan. This paper uses a qualitative method with documentation studies as a source of research information. The results of this study indicate that there are conflict resolution efforts that have been made to achieve peace in the country of Sudan. By using Johan Galtung's conflict resolution approach, three forms of resolution models have been grouped, namely Peacemaking with the help of IGAD (Intergovernmental Authority on Development), AU (African Union), Saudi Arabia and the United States, Peacekeeping with the help of the UN Security Council mandate namely UNITAMS United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan) and Peacebuilding by forming three framework agreements namely the Juba Peace Agreement (JPA), the Treaty of Jeddah and the Sudan Framework.</p>

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian dari perputaran siklus kekuasaan yang memang sering terjadi di berbagai daerah. Semakin kompleks masyarakat di wilayah tersebut maka semakin banyak pengaruh yang dilakukan oleh negara-negara kuat di dunia membuat negara bergerak secara dinamis. Wilayah Timur Tengah (*Middle East*) selama ini selalu menjadi *headline* bagi media-media seluruh dunia terkait dengan konflik yang terjadi di wilayah tersebut. Konflik Timur Tengah merupakan salah satu konflik kawasan yang sifatnya berkepanjangan. Penyelesaian atas konflik tersebut telah melibatkan banyak pihak, mulai dari organisasi internasional, seperti PBB sampai dengan negara *superpower* seperti Amerika Serikat dan Rusia. Sikap oportunis, ego, dan pragmatis dari penduduk bahkan pemimpin kawasan Timur Tengah itu sendiri yang menyebabkan konflik seakan-akan dibiarkan terus-menerus.

Sudan adalah salah satu negara di benua Afrika yang memiliki luas sekitar 1.886.068 km² (BBC Monitoring, 2023). Sudan berbatasan dengan Ethiopia, Eritrea, dan Laut Merah di sebelah timur; Afrika Tengah dan Chad di sebelah barat; Zaire, Uganda, dan Kenya di sebelah selatan; dan Mesir di sebelah utara. Sudan adalah negara Afrika dengan keanekaragaman etnis yang paling kompleks. Negara ini sendiri memiliki 597 kelompok etnis dan subkelompok, yang telah lama dikenal oleh mayoritas orang di benua Afrika, di antaranya adalah komunitas Arab Afrika dan suku-suku

seperti Beja dan Nubia. Sekitar 60% dari populasi Sudan beragama Islam. Fakta ini dilatarbelakangi oleh sejarah Sudan sebagai wilayah kekuasaan Turki Utsmani. Selain Islam, ada juga sekitar 25% yang menganut animisme dan agama tradisional, dan sekitar 5% beragama Kristen (Angelo, 2009).

Terletak di wilayah Sahel yang merupakan “coup belt”, Sudan memiliki sejarah panjang kudeta dan pemerintahan militer, yang bertentangan dengan perjuangan gigih rakyat Sudan untuk melahirkan tatanan politik yang demokratis. Perang saudara yang sedang berlangsung, yang meletus pada pertengahan April 2023 antara Sudan Armed Forces (SAF) dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF), sebagian dipengaruhi oleh warisan politik ini, di mana kekuasaan diakses dan dialihkan melalui kekerasan daripada melalui pemilihan umum.

Sejak memisahkan diri dari Inggris pada tahun 1956 dan mendeklarasikan diri telah merdeka tidak serta merta membawa keamanan dan stabilitas bagi masyarakat Sudan. Sejarah panjang kudeta, kekuasaan militer, masalah ekonomi, masalah politik, ketegangan etnisme pertikaian agama dan persaingan sumber daya menghiasi perjalanan panjang hingga saat ini untuk memperjuangkan dan mendukung tatanan politik yang ingin dicapai oleh negara Sudan (Sawant, 1998).

Dalam sejarah modernnya, Sudan telah mengalami hampir tiga puluh lima kali kudeta, menjadikan negara ini sebagai “laboratory of coups”. Dari upaya pengambilalihan kekuasaan oleh militer ini, enam di antaranya berhasil, sementara dua belas lainnya gagal dan tujuh belas lainnya digagalkan. Sementara beberapa hanya mengalihkan kekuasaan dari satu pemimpin militer ke pemimpin militer lainnya, yang lainnya mengakhiri periode pemerintahan demokratis yang berumur pendek (1956-1958, 1964-1969, dan 1985-1989). Mantan Presiden Omar Al-Bashir, yang digulingkan pada April 2019, sebelumnya merebut kekuasaan dalam kudeta terhadap pemerintahan Sadiq Al-Mahdi yang terpilih secara demokratis pada tahun 1989 (Ayferam, 2023). Belum lama ini, pada bulan Oktober 2021, ketika jabatan ketua Dewan Kedaulatan mengambil keputusan tertinggi dibawah pemerintahan demokrasi transisi yang akan digantikan oleh kelompok pro-demokrasi dari militer membawa dampak terhadap lemahnya dukungan dari negara-negara barat sehingga perekonomian berada dalam keruntuhan dan kehidupan masyarakat menjadi miskin. Dominasi arena politik sejak kudeta tepat satu tahun yang lalu juga menciptakan situasi politik yang penuh dengan perpecahan internal. Perilaku mereka sendiri ditandai oleh keragu-raguan; dan penindasan yang mereka lakukan berarti tangan mereka berlumuran darah.

Akhirnya pada tanggal 15 April 2023, bentrokan militer terjadi antara the Sudan Armed Forces (SAF) yang bersekutu dengan jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter Rapid Support Force (RSF) yang dipimpin oleh Mohammed Hamdan Dagalo di Sudan. Bentrokan tersebut menunjukkan kehancuran total atas pengaturan kekuasaan yang telah berkembang antara pemimpin. Sejak penggulingan rezim Omar al-bashir pada bulan April 2019 dan dimulainya transisi menuju demokrasi serta peluncuran penjanjian kerangka kerja baru untuk melebur SAF dan RSF. Kerangka kerja tersebut ditolak oleh SAF dan RSF yang menginginkan kepemimpinan militer. Sejak saat itu, pertempuran belum berakhir. Sebaliknya, ibu kotanya, Khartoum, mengalami kerusakan parah, dan pertempuran meluas, menyebabkan lebih dari 3 juta orang mengungsi di seluruh negeri dan luar negeri (Countries, 2023). Ini adalah pertama kalinya pertempuran besar-besaran terjadi di ibu kota Sudan (Malik, 2023).

Awalnya, pertempuran diperkirakan akan berakhir dalam beberapa hari. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan militer yang sangat besar antara SAF dan RSF; SAF memiliki pesawat angkatan udara, tank, dan peralatan lainnya, sedangkan unit dasar RSF adalah truk pickup yang dilengkapi dengan senjata api. Namun, pertarungan keduanya belum menunjukkan tanda-tanda akan

berakhir meski sudah tiga bulan berlalu. Sebaliknya, RSF tidak hanya melakukan serangan gerilya terhadap pangkalan-pangkalan utama dan rumah-rumah biasa di Khartoum dan mengubahnya menjadi benteng pertahanan, namun juga mulai membuat tentara RSF tinggal di rumah-rumah yang telah dikosongkan karena evakuasi (New York Times, 2023). Pertempuran antara RSF dan SAF terjadi di Khartoum, dan Darfur di bagian barat Sudan, namun wilayah pertempuran secara bertahap menyebar hingga mencakup tidak hanya Sudan barat tetapi juga wilayah bagian tenggara seperti Gedaref dan Kassala. Di Kordofan di barat daya Sudan dan Nil Biru di selatan, kelompok bersenjata lainnya, SPLM-N Al-Hilu, telah mulai berperang melawan SAF. Negara sudah tidak mampu lagi menjaga ketertiban keamanannya.

METODE PENELITIAN

Agar mendapat penjelasan yang komprehensif maka tulisan ini menggunakan pembagian jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah: Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)". Contoh data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok Fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber (Nur Indrianto dan Bambang Supono, 2013). Sedangkan data sekunder adalah: "Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)" (Husein Umar, 2013). Selanjutnya, teknik pengumpulan data adalah proses dan cara yang di pergunakan penulis untuk mendapatkan data yang di butuhkan. Setiap penelitian baik itu penelitian kualitatif ataupun penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam memperoleh hasil penelitian adalah dengan menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari buku, jurnal, selain itu juga penulis menggunakan teknik dokumnetasi dari laporan, artikel dan berita yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Konsep resolusi konflik digunakan untuk memahami bagaimana cara dan upaya yang dapat dilakukan agar terciptanya rivalitas antar kedua pemimpin dapat reda sehingga terciptanya kedamaian di negara Sudan. Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan "conflict resolution" yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan atau penghilangan permasalahan (Levine, 1998).

Mendefinisikan resolusi konflik sebagai "conducting conflicts, constructively, even creatively". Hal itu berarti meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang saling dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai (Kriesberg, 2006). Konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik di antara mereka. Model resolusi konflik Johan Galtung digunakan untuk menganalisis bagaimana upaya yang telah dilakukan untuk menciptakan perdamaian pada pertikaian antara kedua pimpinan. Model yang meliputi *peacemaking*, *peacekeeping*, dan *peacebuilding*. Menjadi alat dalam pengelompokan upaya yang telah dilakukan di negara Sudan, ketiga rangkaian model resolusi konflik yang dikemukakan oleh Galtung memiliki dimensi dan target serta tujuan masing-masing, namun serangkaian model tersebut akan bermuara pada tujuan akhir yang sama yaitu mewujudkan perdamaian jangka panjang dalam upaya menciptakan resolusi konflik (Galtung, 1976).

Model *peacemaking* merupakan tahap awal yang dapat dilakukan ketika konflik antara RSF dan SAF ini muncul dengan sesegera mungkin untuk menciptakan satau perdamaian sebelum konflik dapat berkembang. Perdamaian dapat diwujudkan dengan upaya negosiasi antara kedua kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan (Jamil, 2007) dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai negosiator dalam penyelesaian tersebut. Model *peacekeeping* adalah tahapan selanjutnya dari model *peacemaking*, *peacekeeping* menurut Galtung merupakan pendekatan dalam meresolusi konflik dengan cara memisahkan pihak yang berkonflik. Yang dimaksudkan dengan memisahkan pihak yang berkonflik adalah dengan memberikan batasan-batasan agar pihak yang berkonflik tidak bersinggungan langsung dan berpotensi terjadi perpecahan atau konflik yang berujung dengan kekerasan (Miall, 2002). Dan selanjutnya model *peacebuilding*, model ini merupakan tahap terakhir dari tawaran model yang dikemukakan oleh Johan Galtung. Berpusat pada penguatan institusi politik, reformasi pengaturan keamanan internal dan eksternal, serta revitalisasi ekonomi dan struktur sosial negara. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kesepakatan perdamaian antara pihak yang berkonflik dan memperbaiki keadaan setelah konflik. Dengan kata lain, *peacebuilding* adalah yakni strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik.

HASIL DAN DISKUSI

Konflik Bersenjata Sipil di Sudan

Konflik kekerasan dan perselisihan sipil adalah realitas politik di Sudan pasca kemerdekaan, yang menyebabkan negara ini kehilangan wilayah selatannya secara permanen (sekarang Sudan Selatan), setelah referendum pada tahun 2011. Selain itu, kombinasi konflik sipil yang penuh kekerasan dan kudeta militer telah menghambat upaya transisi dan pembangunan pemerintahan demokratis di Sudan. Lebih dari enam dekade setelah Sudan meraih kemerdekaannya, dampak merugikan dari konflik dan pertikaian sipil di negara ini masih terus berlanjut, dan kini menjadi ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup negara. Potensi runtuhnya Sudan sebagai sebuah negara yang berfungsi akan memiliki dampak yang merugikan tidak hanya bagi negara dan rakyat Sudan, tetapi juga bagi wilayah yang lebih luas dan sekitarnya. Dorongan untuk memulihkan perdamaian, ketertiban, dan stabilitas di Sudan mengandaikan pemahaman tentang signifikansi, dampak, dan implikasi konflik yang sedang berlangsung terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas domestik, regional, dan internasional

Perang saudara yang pecah di Sudan pada tahun 2023 berawal dari perebutan kekuasaan setelah penggulingan diktator/presiden Sudan Omar al-Bashir pada 11 April 2019, yang dipicu oleh tuntutan rakyat agar ia mengundurkan diri. Dalam kekosongan kekuasaan yang terjadi, pemerintahan sementara kolaborasi sipil-militer yang dipimpin oleh Abdalla Hamdoug dibentuk. Ada harapan untuk demokrasi dan persatuan Sudan setelah perjanjian pembagian kekuasaan ditandatangani pada 7 Agustus 2019, antara Transitional Military Council (TMC) dan oposisi Forces of Freedom and Change (FFC) (United Nations, 2022). Perjanjian ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan transisi selama tiga tahun menjelang pemilihan umum yang demokratis pada tahun 2022. Namun, transisi politik Sudan terhenti karena ketidakmampuan kelompok politik utama untuk bersepakat, termasuk militer, oposisi, dan kelompok masyarakat sipil (Tossell, 2020). Proses politik semakin terganggu oleh kudeta militer pada tahun 2021 dan konflik yang sedang berlangsung antara SAF dan RSF. Konflik ini mencerminkan perjuangan di antara para pemimpin Sudan, dengan kepentingan dan prioritas yang berbeda, sehingga menghambat transisi yang mulus menuju demokrasi.

Dengan latar belakang ini, struktur keamanan Sudan selama proses transisi telah dirusak oleh perpecahan antara SAF dan RSF paramiliter. Monopoli kekerasan terpecah-pecah karena adanya keseimbangan kemampuan dan kepentingan antara SAF dan RSF paramiliter. Isu-isu yang diperdebatkan seperti keadilan transisi, akuntabilitas, dan reformasi keamanan, termasuk integrasi Rapid Support Forces (RSF), dibahas dalam pertemuan para pemimpin militer dan sipil pada November 2021 dan isu-isu ini merupakan bagian dari rencana untuk kembali ke pemerintahan yang dipimpin oleh sipil pada Januari 2023.

Salah satu masalah besar adalah perpecahan antara SAF dan RSF dalam mengintegrasikan kekuatan sebagai bagian dari proses transisi politik untuk mendirikan negara sipil di Sudan setelah penggulingan pemimpin yang telah lama berkuasa, Omar al-Bashir, pada tahun 2019. Pada April 2023, ketegangan meningkat di antara kedua kelompok ini terkait penggabungan, dengan saling tuduh dari kedua belah pihak. Jenderal Mohamed Hamdan Dagalo (dikenal sebagai Hemedti), wakil negara dan kepala kelompok paramiliter RSF, mengkritik Al-Burhan atas kudeta tahun 2021, sementara tentara memperingatkan masa-masa berbahaya di masa depan. Ketidaksepakatan yang kuat antara kedua pemimpin militer itu menyebabkan pertempuran sengit yang dimulai pada 15 April 2023, yang berubah menjadi perang penuh. Khartoum, ibu kota, menjadi zona perang, dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri.

Meskipun transisi politik yang gagal, kudeta militer, integrasi, dan masalah kontrol dari Rapid Support Force merupakan salah satu alasan utama dari konflik saat ini di Sudan, Al-Burhan dan saingannya dari RSF pada dasarnya memperjuangkan legitimasi dan dukungan sebagai pemimpin Sudan yang sebenarnya (Español, 2023). Sekarang, perang bukan hanya tentang penguasaan kota-kota strategis, tetapi tentang perjuangan untuk mendapatkan legitimasi kepemimpinan antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dari SAF dan Mohamed Hamdan Dagalo ("Hemedti") dari RSF, di mana masing-masing pihak berjuang untuk membuktikan klaim mereka sebagai pemimpin Sudan yang sah. Perang terus berlanjut hingga tahun 2024, mengakibatkan krisis kemanusiaan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menciptakan kekurangan pangan dan perawatan kesehatan yang parah. Secara ekonomi, konflik ini telah menghancurkan ekonomi Sudan, dan melonjaknya angka kemiskinan. Mengingat warisan pemerintahan militer dan konflik antar negara bagian di Sudan, dan fakta bahwa kedua belah pihak yang bertikai memiliki kekuatan dan tujuan yang seimbang, eskalasi kekerasan baru-baru ini dapat membawa negara ini tidak hanya kembali ke pemerintahan otoriter dan fragmentasi negara, namun juga mempengaruhi negara-negara tetangga di wilayah tersebut (Kiros, 2024).

Resolusi Konflik Model Johan Galtung

Model Resolusi Konflik Peacemaking

Peacemaking merupakan pendekatan dengan mempertemukan atau merekonsiliasi pihak-pihak yang berkonflik. Selain itu, peacemaking merupakan tahapan dalam resolusi konflik konstruktif yang bersifat take and give dan saling menghargai nilai-nilai pihak yang terlibat konflik. Model upaya resolusi konflik peacemaking di negara Sudan akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi IGAD (Intergovernmental Authority on Development) dan AU (African Union)

Aktor regional dan internasional selalu mengkomunikasikan untuk menyelesaikan situasi di Republik Sudan. Upaya ini adalah mempertemukan panglima militer Sudan Abdel Fattah al-Burhan dan pimpinan paramiliter Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo. Komunikasi IGAD dan AU

menghasilkan KTT luar biasa ke-41 pada tanggal 09 Desember 2023 di Djibouti. The 41st Extra-Ordinary Summit of IGAD Heads of State and Government yang dipimpin oleh Presiden Djibouti Ismail Omar Guelleh menyerukan untuk mengatasi permasalahan yang ada dan kebutuhan kemanusiaan rakyat Sudan, serta mengatasi konflik di Sudan yang telah dimulai sejak 15 April 2023.

KTT luar biasa ini menghasilkan gencatan senjata tanpa syarat antara Jenderal SAF Burhan dan Jenderal RSF Hemedti serta pertemuan tatap muka antara mereka untuk melindungi rakyat Sudan dan stabilitas regional serta memimpin Sudan menuju transisi sipil. Selain itu, partai politik Sudan mengumumkan bahwa Afrika Union (AU) dan Intergovernmental Authority on Development (IGAD) telah mengajukan sebuah visi baru untuk mengakhiri perang, yang membuka jalan bagi sebuah proses politik inklusif yang melibatkan semua pihak (Yassin, 2023).

2. Inisiatif Arab Saudi dan Amerika Serikat Menjadi Mediator

Arab Saudi dan Amerika Serikat juga mendukung upaya mediasi antara Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF) dan menekankan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk terlibat secara aktif untuk mencapai kesepakatan dan mengakhiri konflik yang sedang berlangsung. Sejumlah gencatan senjata telah dilanggar sejak konflik pecah pada pertengahan April. Inisiatif AS-Saudi di Jeddah adalah upaya serius pertama untuk mengakhiri pertempuran yang membahayakan transisi Sudan yang rapuh akibat kekacauan dan pemberontakan selama bertahun-tahun. (Al Jazeera Media Network, 2023)

Arab Saudi meminta untuk bertindak sebagai mediator untuk membantu mengakhiri kekerasan dan memulihkan stabilitas di wilayah Sudan. Arab Saudi memainkan peran kunci dalam evakuasi ribuan orang dari negara yang dilanda perang tersebut. Pada awal Mei, Saudi dilaporkan telah mengevakuasi lebih dari 3.000 orang dari Port Sudan, termasuk warga negara Saudi dan juga orang-orang dari 80 negara lainnya. Peran penting Saudi dalam memelopori evakuasi orang-orang yang mencoba melarikan diri dari meningkatnya pertempuran antara pasukan Sudan yang bersaing baru-baru ini telah meningkatkan kemungkinan bahwa Kerajaan tersebut dapat menggunakan pengaruhnya untuk melakukan hal yang sama. mengakhiri pertempuran (Coughlin, 2023).

Bentuk gencatan senjata telah banyak dilakukan untuk menghentikan pertempuran dan mencoba menegosiasi perdamaian antara pihak yang bertikai. Gencatan senjata pertama dilakukan pada 10 hari setelah konflik antara SAF dan RSF pecah. Menteri luar negeri AS Antony Blinken mengumumkan: "Setelah negosiasi intensif selama 48 jam terakhir, SAF dan RSF telah sepakat untuk menerapkan gencatan senjata nasional yang dimulai pada tengah malam pada 24 April, berlangsung selama 72 jam." Hal ini terjadi setelah Sekjen PBB memperingatkan bahwa Sudan berada di "tepi jurang maut" menyusul pertempuran antara dua pihak yang bersaing yang telah melancarkan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya di ibu kota, Khartoum, serta di tempat lain di negara tersebut (New Wires, 2023). Namun gencatan senjata tersebut gagal akibat penembakan di tengah kota Khartoum.

AS dan Arab Saudi melakukan mediasi kembali antara pihak-pihak yang bertikai selama berminggu-minggu, dan berbagai perjanjian gencatan senjata gagal menghentikan pertempuran, yang semakin meningkat di Sudan. Pernyataan mereka mengatakan bahwa SAF dan RSF sepakat untuk menghentikan pertempuran dan "menahan diri dari mencari keuntungan militer selama gencatan senjata," dan juga akan "mengizinkan pergerakan tanpa hambatan dan pengiriman bantuan kemanusiaan ke seluruh negeri". Gencatan senjata nasional, yang mulai berlaku pada hari Minggu pukul 6 pagi (04:00 GMT), akan berlangsung hingga 21 Juni, menurut pernyataan bersama dari

Riyadh dan Washington (Al Jazeera, 2023). Namun, gencatan senjata yang dilakukan kembali gagal akibat penyerangan pesawat dan drone di kota Khartoum.

Model Resolusi Konflik Peacekeeping

Model upaya resolusi konflik *peacekeeping* di negara Sudan adalah dibentuknya sebuah mandat yakni United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS). Pada tanggal 3 Juni, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi 2524 (2020) , membentuk United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS), sebuah misi politik khusus, untuk memberikan dukungan kepada Sudan selama periode 12 bulan awal selama transisi politiknya. menuju pemerintahan yang demokratis. Berkantor pusat di Khartoum, UNITAMS akan mendukung Sudan melalui serangkaian inisiatif politik, pembangunan perdamaian dan pembangunan, termasuk membantu negara tersebut mencapai tujuan Deklarasi Konstitusi pada Agustus 2019, dan melaksanakan Rencana Nasional untuk Perlindungan Sipil. UNITAMS akan mengintegrasikan pertimbangan gender sebagai isu lintas sektoral di seluruh mandatnya. Hal ini termasuk, misalnya, membantu Pemerintah Sudan dalam memastikan partisipasi perempuan secara penuh, setara dan bermakna di semua tingkatan dalam proses perdamaian dan politik dan dalam semua aspek kehidupan sosial dan ekonomi, serta implementasi resolusi Dewan Keamanan PBB mengenai Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (United Nations, 2023).

Tabel 1. Serangkaian misi bantuan UNITAMS

Sumber: data olahan penelitian (2024)

UNITAMS	Misi Bantuan
2020	<ul style="list-style-type: none">- Dibentuknya UNITAMS (<i>United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan</i>)- Akses kebersihan dan kesehatan pada masa Covid-19 di daerah Dafur- Bantuan keuangan \$1.8 M untuk membantu menuju perdamaian dan Demokrasi- Mendorong pendatangannya <i>Juba Peace Agreement</i> agar tercapainya perdamaian dilapangan
2021	<ul style="list-style-type: none">- Mendukung proses perdamaian dan implementasi Perjanjian Perdamaian Juba dan perjanjian perdamaian di masa depan- Menjadi perantara dalam krisis konstitusi antara Perdana Menteri Abdallah Hamdok dan Letjen Abdel Fatah al-Burhan- Mendorong sudan untuk selalu melindungi HAM akibat krisis politik yang terjadi antara Pertempuran antara kekuatan Pemerintahan transisi dan gerakan bersenjata
2022	<ul style="list-style-type: none">- Konsultasi mengenai Proses Politik di Sudan dengan para pemangku kepentingan termasuk Pemerintah, aktor politik, mitra perdamaian, gerakan bersenjata, masyarakat sipil, komite perlawanan, kelompok perempuan, dan pemuda.- Membantu transisi politik, kemajuan menuju pemerintahan demokratis, dalam perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia, dan perdamaian berkelanjutan- Mekanisme Trilateral antara <i>United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan</i> (UNITAMS), <i>African Union (AU)</i> dan <i>Intergovernmental Authority on Development</i> (IGAD) dalam menyambut penandatanganan Kerangka Perjanjian antara Politik sipil dan Institusi Militer

UNITAMS	Misi Bantuan
2023	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendekatan dengan pihak-pihak dalam rangka mendorong penandatanganan Sudan Framework Agreement agar tercapainya transisi pemerintahan yang di pimpikan oleh rakyat sudan - Dukungan UNITAMS terhadap kontaminasi persenjataan yang bersifat eksplosif yang dapat mengancam kehidupan dalam gerakan "<i>the United Nations declared April 4th as International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action</i>" - Mendukung Proses Gencatan Senjata yang dilakukan terhadap konflik yang terjadi untuk menghindari kerusakan berlebihan dan melindungi rakyat Sudan - Dewan Keamanan PBB menghentikan mandat UNITAMS

Namun. Misi Dewan Keamanan PBB ini akan berakhir mandat UN Integrated Transition Assistance Mission in the Sudan (UNITAMS) dan mulai menghentikan operasinya selama periode tiga bulan yang dijadwalkan berakhir pada 29 Februari 2024. Awalnya. UNITAMS dibentuk pada tahun 2020 untuk membantu mendukung transisi demokrasi di Sudan setelah jatuhnya Presiden Omar al-Bashir pada tahun sebelumnya. Namun pada Oktober 2021, jalan sulit menuju pemerintahan sipil terhenti ketika panglima militer Abdel Fattah al-Burhan mengambil alih kekuasaan penuh melalui kudeta (Abdallah, 2023).

Bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi 2715 (2023) dengan suara 14 suara setuju dan tidak ada yang menentang, dengan satu suara abstain (Federasi Rusia), yang meminta Misi tersebut untuk memulai penghentian operasinya pada tanggal 4 Desember 2023 dan mengalihkan tugasnya ke badan, dana, dan program PBB. Dewan juga memutuskan likuidasi UNITAMS akan dimulai pada 1 Maret 2024 dan menyerukan UNITAMS untuk membuat pengaturan keuangan yang sesuai dengan tim negara PBB, yang memungkinkan PBB untuk mengawasi sisa kegiatan kerja sama program yang sebelumnya diprakarsai oleh UNITAMS.

Dalam ketentuan lebih lanjut, Dewan menggaris bawahi perlunya transisi dan likuidasi UNITAMS yang tertib untuk menjamin keselamatan personel PBB dan berfungsinya seluruh operasi PBB secara efektif, termasuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan. Dewan juga memutuskan untuk mengizinkan, selama masa transisi dan likuidasi Misi, retensi personel keamanan yang diperlukan dari wilayah yang ada di Sudan untuk melindungi personel, fasilitas, dan aset Misi. Resolusi ini menyerukan kepada pihak-pihak terkait di Sudan untuk bekerja sama secara penuh dengan PBB selama transisi dan likuidasi Misi tersebut, dan meminta agar Sekretaris Jenderal terus memberikan informasi kepada Dewan Keamanan mengenai transisi dan likuidasi tersebut.

Melalui teks tersebut, Dewan mengingatkan pentingnya kewajiban hukum Sudan, berdasarkan Konvensi Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1946, dan status perjanjian misi tanggal 4 Juli 2021, hingga keluarnya elemen terakhir Misi dari Sudan dan menyerukan kepada para pihak untuk bertindak sesuai dengan kewajiban Sudan berdasarkan instrumen ini. Mereka menyambut baik penunjukan Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal untuk Sudan, Ramtane Lamamra, dan menyerukan semua pihak untuk bekerja sama dengan kantornya. Dewan juga meminta Sekretaris Jenderal untuk memberikan laporan tertulis dalam 90 hari, dan kemudian memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan setiap 120 hari mengenai upaya PBB untuk mendukung Sudan menuju perdamaian dan stabilitas, dan agar laporan ini terus ditinjau (OCHA, 2023).

Model Resolusi Konflik Peacebuilding

Model resolusi *peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses *peacebuilding* diharapkan perdamaian negatif (*the absence of violence*) berubah menjadi perdamaian positif dimana masyarakat merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif. Model upaya resolusi konflik *peacebuilding* dinegara Sudan adalah dibentuknya perjanjian untuk meredam konflik yang terjadi diantara kedua pimpinan The Sudan Armed Forces (SAF) yang bersekutu dengan jenderal Abdel fattah al-Burhan dan pasukan paramiliter Rapid Support Force (RSF) yang dipimpin oleh Mohammed Hamdan Dagalo. Berikut bentuk perjanjian yang telah dibuat:

1. Juba Peace Agreement (JPA)

Pada bulan Oktober 2020, Perjanjian Juba untuk Perdamaian di Sudan ditandatangani oleh pemerintah transisi Sudan dan oleh banyak faksi utama yang bertikai di negara tersebut. Perjanjian ini sangat kompleks dan mencakup berbagai bidang, termasuk pemerintahan, keamanan dan keadilan transisi dan dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi proses negosiasi konstitusional di masa depan.

Perjanjian perdamaian yang ditandatangani pada 3 Oktober 2020 membuka jalan bagi kelompok oposisi bersenjata dan tidak bersenjata di Sudan untuk bergabung dengan pemerintahan transisi, sehingga secara signifikan memperluas keterwakilan daerah pinggiran negara tersebut selama periode sementara sebelum pemilu. Namun, dua gerakan pemberontak paling kuat masih berada di luar perjanjian tersebut.

Perjanjian perdamaian Sudan pada bulan Oktober 2020, yang antara lain melibatkan pemerintah sementara dan gerakan pemberontak di Darfur dan Dua Wilayah, merupakan langkah penting dalam transisi negara tersebut setelah gulingnya mantan Presiden Omar al-Bashir. Kesepakatan tersebut memungkinkan perwakilan kelompok bersenjata di wilayah pinggiran negara tersebut untuk menduduki jabatan pemerintahan dan mendapatkan dana publik yang signifikan untuk disalurkan ke wilayah tersebut. Ini adalah cara untuk menyeimbangkan kembali dominasi elit Lembah Nil yang telah berlangsung selama puluhan tahun terhadap sistem politik Sudan. Perjanjian Damai Juba berupaya untuk memperbaiki ketidakseimbangan historis antara pusat dan pinggiran negara dengan mengalihkan kekuasaan dan kekayaan dari Khartoum.

Namun hal ini juga menimbulkan permasalahan baru. Beberapa gerakan pemberontak yang menandatangani pakta tersebut terpecah; dua yang terkuat tetap berada di luarnya. Khartoum juga kekurangan miliaran dolar yang dibutuhkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kesepakatan tersebut. Pemerintah harus memasukkan kelompok pemberontak ke dalam institusi keamanan tanpa menggembungkan militer, yang akan mengurus keuangan negara dan menenggelamkan agenda reformasi kabinet sipil. Meskipun para pendukung Sudan mendesak Khartoum untuk mereformasi sektor keamanan, mereka seharusnya mendanai program demobilisasi dan mendukung komitmen kabinet untuk berinvestasi di bidang-bidang yang tidak mendukung Sudan (Areas et al., 2021).

2. Treaty of Jeddah

Kerajaan Arab Saudi dan Amerika Serikat dengan bangga mengumumkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi, Perjanjian yang telah ditandatangani dalam rangka Deklarasi

Komitmen mengakui kewajiban kedua belah pihak berdasarkan hukum kemanusiaan dan hak asasi manusia internasional untuk memfasilitasi aksi kemanusiaan guna memenuhi kebutuhan darurat warga sipil dan menerapkan Confidence-Building Measures (CMB). Perjanjian ini bernama “Jeddah Declaration of Commitment to Protect the Civilians of Sudan” yang ditandatangani oleh Sudanese Armed Forces (SAF) dan Rapid Support Forces (RSF), Intergovernmental Authority on Development (IGAD), Africa Union (AU) dan Amerika Serikat (IGAD Secretariat, 2023).

Deklarasi Komitmen ini akan memandu tindakan kedua kekuatan untuk memungkinkan penyampaian bantuan kemanusiaan yang aman, pemulihan layanan-layanan penting, penarikan pasukan dari rumah sakit dan klinik, dan penguburan jenazah secara hormat. Setelah penandatanganan, Pembicaraan Jeddah akan fokus pada pencapaian kesepakatan mengenai gencatan senjata yang efektif hingga sekitar sepuluh hari untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini. Langkah-langkah keamanan tersebut akan mencakup mekanisme pemantauan gencatan senjata yang didukung AS-Saudi dan internasional.

Komitmen bersama dan individu ini dapat mewakili langkah-langkah penting dalam memfasilitasi peningkatan akses kemanusiaan untuk membantu meringankan penderitaan rakyat Sudan. Namun hasil perundingan tersebut tidak disetujui oleh salah satu pihak yang berkonflik.

3. Sudan Framework Agreement

Menyusul kudeta militer tahun 2021 dan pengunduran diri mantan Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada Januari 2022, PBB menjadi perantara proses konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan Sudan untuk mengatasi krisis politik. Pada tanggal 5 Desember 2022, militer menandatangani perjanjian kerangka kerja dengan puluhan pemimpin sipil, di mana para jenderal berjanji untuk melepaskan sebagian besar kekuasaan politik mereka. Kesepakatan tersebut, yang telah didiskusikan secara diam-diam selama berbulan-bulan, merupakan sebuah pencapaian besar, namun menghadapi rintangan yang panjang. Hal ini tidak termasuk mantan pemberontak dan pihak lain yang dapat melemahkan pemerintah transisi jika tidak diikutsertakan. Banyak dari mereka yang menentang perjanjian tersebut, termasuk “resistance committees” yang merupakan inti dari gerakan protes yang menuntut pemerintahan sipil, ragu bahwa para jenderal akan menghormati ketentuan perjanjian tersebut (Idris and Jeffery, 2022).

Namun perjanjian yang seharusnya menjadi titik awal kebangkitan transisi pemerintahan sipil dan demokrasi, menjadi titik awal dari permasalahan yang terjadi pada April 2023. Perjanjian kerangka kerja ini juga dikritik karena menetapkan tenggat waktu yang tidak realistis untuk melakukan reformasi yang rumit.

KESIMPULAN

Didasarkan pada penjelasan diatas, beberapa upaya perdamaian telah dilakukan. Awalnya upaya perdamaian dibuat agar rivalitas antara kedua pimpinan militer dan transisi sipil dapat berjalan dengan baik, termasuk melalui Dewan Keamanan PBB dengan mebebri mandat pembentukan UN Integrated Transition Assistance Mission in the Sudan (UNITAMS) dan dua bentuk perjanjian telah dibuat Namun gagal, upaya tersebut makin memperburuk hubungan kedua pimpinan dan memperlambat transisi pemerintahan demokratis yang diinginkan. Puncaknya pada tanggal 15 April 2023 pepecahan tidak dapat dihindari bentrokan militer terjadi antara Sudanese Armed Forces (SAF) yang dukomandani oleh Jendral Abdel Fattah al-Burhan dan kubu paramiliter Rapid Support Forces (RSF) yang dipimpin oleh Mohamed Hamdan “Hemedti” Dagalo.

Setelah konflik antara kedua pimpinan terjadi, upaya terus dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan kekuasaan antara Burhan dan Hemedti. Organisasi regional dan internasional, serta negara-negara asing, terus meminta perdamaian. Intergovernmental Authority on Development (IGAD) dan African Union (AU) terus berusaha untuk mengatur pertemuan antara panglima militer Sudan Abdel Fattah al Burhan dan pimpinan militer Mohamed Hamdan "Hemedti" Dagalo untuk menyelesaikan masalah di Republik Sudan. Selain itu, Arab Saudi dan Amerika Serikat menyambut baik untuk bertindak sebagai mediator dalam konflik yang terjadi dan meminta gencatan senjata agar negosiasi dapat dilakukan untuk mengakhiri konflik yang tidak berhenti yang membahayakan rakyat Sudan. Namun, usaha ini masih gagal. Bukan hanya itu, Dewan Keamanan PBB dengan mandatnya menarik kembali United Nations Integrated Transition Assistance Mission in Sudan (UNITAMS) akibat Sudan yang tidak tunduk atas aturan kewajiban hukum yang telah disepakati.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Jazeera. (2023). Sudan's warring sides agree to new 72-hour ceasefire. Al Jazeera Media Network. <https://www.aljazeera.com/news/2023/6/17/air-raid-kills-17-in-sudans-capital-khartoum>
- Al Jazeera Media Network. (2023). Rival Sudan factions meet in Saudi Arabia as pressure mounts. Al Jazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/5/6/rival-sudan-factions-meet-in-saudi-arabia-as-pressure-mounts>
- Angelo, G. D. (2009). Religion and the Secular State: Sudan National Report. 645–667.
- Ankush B. Sawant. (1998). Ethnic Conflict in Sudan in Historical Perspective. *Theory & Psychology*, 35(3), 343–363. <https://doi.org/10.1177/0020881798035003006>
- Areas, T., Omar, P., & Valley, N. (2021). The Rebels Come to Khartoum: How to Implement Sudan's New Peace Agreement.
- Ashraf Idris and Jack Jeffery. (2022). Sudan's generals, pro-democracy group ink deal to end crisis. AP Report. <https://apnews.com/article/middle-east-africa-sudan-khartoum-651a0be9bf731d32df41d493a191418e>
- Ayferam, G. (2023). Sudan's Conflict in the Shadow of Coups and Military Rule. Carnegie Endowment for International Peace. <https://carnegieendowment.org/sada/90382>
- BBC Monitoring. (2023). Republic of The Sudan: Facts. BBC. <https://www.bbc.com/news/world-africa-14094995>
- Con Coughlin. (2023). 'Saudi Arabia can play a crucial role in mediating Sudan conflict.' Al Majalla Magazine. <https://en.majalla.com/node/290716/politics/saudi-arabia-can-play-crucial-role-mediating-sudan-conflict>
- Countries, N. (2023). Regional Sudan Response Situation Update 18 July 2023. July, 1–5.
- Español, M. (2023). Inside Burhan's quest for international legitimacy in Sudan. The New Arab. <https://www.newarab.com/analysis/inside-burhans-quest-international-legitimacy-sudan>
- Hugh Miall. (2002). Resolusi Damai Konflik Kontemporer: Menyelesaikan, Mencegah, Melola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Husein Umar. (2013). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis (Ed. 2). Jakarta: Rajawali Pers.
- IGAD Secretariat. (2023). Joint Statement of Commitments from Jeddah Talks Between Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces. IGAD. <https://igad.int/statement-of-commitments-from-jeddah-talks-between-sudanese-armed-forces-and-rapid-support-forces/>

- Johan Galtung. (1976). *Peace, War and Defense: Essay in Peace Research* (C. Ejlers (Ed.)). Essays in peace research.
- Kiros, K. (2024). THE ONGOING WAR IN SUDAN AND ITS IMPLICATIONS FOR THE SECURITY AND STABILITY OF THE HORN OF AFRICA AND BEYOND. 14. <https://www.policycenter.ma/publications/ongoing-war-sudan-and-its-implications-security-and-stability-horn-africa-and-beyond>
- Louis Kriesberg. (2006). *Constructive conflicts from escalation to resolution*. Maryland: Rowman and Littlefield Publisher Inc.
- M. Mukhsin Jamil. (2007). *Mengelola Konflik Membangun Damai: Teori, Strategi dan Implementasi Resolusi Konflik*. Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC).
- Malik, N. (2023). 'All that we had is gone': my lament for war-torn Khartoum. *The Guradian*. <https://www.theguardian.com/world/2023/jul/18/all-that-we-had-is-gone-my-lament-for-war-torn-khartoum>
- Mohamed Nureldin Abdallah. (2023). Security Council agrees to terminate UN mission in Sudan. *Al Jazeera Media Network*. <https://www.aljazeera.com/news/2023/12/2/security-council-agrees-to-terminate-un-mission-in-sudan>
- Mohammed Amin Yassin. (2023). African Union, IGAD Propose New Vision to End Sudan's War. *Asharq Al-Awsat*. <https://english.aawsat.com/arab-world/4612581-african-union-igad-propose-new-vision-end-sudan's-war>
- New Wires. (2023). US says Sudan warring parties agree to 72-hour ceasefire after hundreds killed. *France 24*. <https://www.france24.com/en/afrique/20230424-us-says-sudan-warring-parties-agree-to-ceasefire-after-hundreds-killed>
- Nur Indrianto dan Bambang Supono. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: FEB Universitas Gajah Mada.
- OCHA. (2023). Security Council Terminates Mandate of UN Transition Mission in Sudan, Adopting Resolution 2715 (2023) in Vote of 14 in Favour to 1 Abstention. *Reliefweb*. <https://reliefweb.int/report/sudan/security-council-terminates-mandate-un-transition-mission-sudan-adopting-resolution-2715-2023-vote-14-favour-1-abstention>
- Stewart Levine. (1998). *Getting to Resolution: Turning Conflict into Collaboration*. San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc.
- The New York Times. (2023). The New York Times. "Sudanese City becomes Center of 'New Phase' of War", *New York Times*, July 11, 2023.
- United Nations. (n.d.). Meetings Coverage and Press Releases, Security Council, 9211th meeting, SC/15131.
- United Nations Security Council. (2023). Mandate.

Copyright holder:

Rendi Prayuda (2024)

First publication right:

[Andalas Journal of International Studies](#)

This article is licensed under:

